

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK SELAKU KREDITOR PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN BERSTATUS RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

ADI NURDIANTO

NPM : 23310014

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK SELAKU KREDITOR PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN BERSTATUS RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Diajukan oleh

Oleh :

ADI NURDIANTO

NPM : 23310014

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BANK SELAKU KREDITOR PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN BERSTATUS RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh :
ADI NURDIANTO
NPM : 23310014

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal 20 Juni 2024

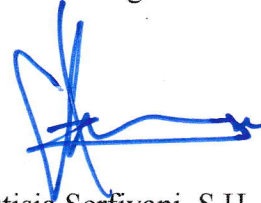
Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

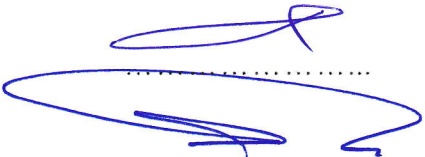
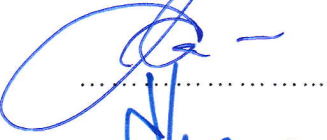
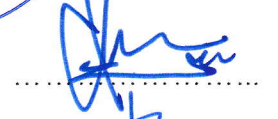


TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BANK SELAKU KREDITOR PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN BERSTATUS RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ADI NURDIANTO
NPM : 23310014


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 13 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H. M.Hum	Ketua 
Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.	Anggota 
Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.	Anggota 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 13 Juli 2024

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan curahan rahmat serta karunianya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebaik-baiknya pantunan seraya berharap syafa'atnya.

Begitu banyak dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan tesis ini hingga tesis ini selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T. B.K.L. Subsp. Onk. (K). FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan motivasi kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya hingga lulus menjadi seorang dengan gelar akademik Magister Hukum (MH) yang berkualitas dan berakhlak.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan juga bimbingan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan juga bimbingan selama Penulis mengikuti proses pembelajaran pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, bimbingan terkait materi dalam Tesis ini dan juga juga bimbingan teknis penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Kedua orang tua penulis Bapak Adi Kuntoro Cahyono dan Ibu Nursiah yang telah mendukung dan selalu mendoakan penulis agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
6. Istri Tercinta Ridha Faridha Djoyo, S.E., M.M., yang telah banyak memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan juga memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kedua anak penulis Alesha Nafila Ardhana dan Ruzain Insu Ardhana yang memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya agar kelak dapat menjadi contoh kepada kedua anak Penulis untuk bisa meraih pendidikan yang tinggi kelak.
8. Seluruh pihak yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun selama proses penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis.

Semoga ilmu dan pengalaman yang Penulis dapat selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk penulis, kemajuan hukum di Indonesia, dan juga masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Juni 2024

Adi Nurdianto

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADI NURDIANTO
NPM : 23310014
Alamat : Grand Permata Jagakarsa Kavling 4 Jalan Musyawarah RT 007 RW 04
Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan
No. Telp : +62 813-1445-8440

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BANK SELAKU KREDITOR PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN BERSTATUS RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI”

Adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Jakarta, 30 Juni 2024



Adi Nurdianto
NPM. 23310014

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	13
3. Manfaat Penelitian	13
3.1 Manfaat Teoritis	13
3.2 Manfaat Praktis	14
4. Metode Penelitian	14
4.1. Tipe Penelitian.....	14
4.2. Metode Pendekatan	15
4.3. Sumber Bahan Hukum	16
4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	17
4.5. Analisis Bahan Hukum.....	18
5. Kajian Teoritis.....	18
5.1. Hukum Perbankan	18
5.2. Kreditor Preferen Pemegang Jaminan.....	23
5.3. Hak Tanggungan.....	26
5.4. Barang Rampasan Negara	30
6. Pertanggungjawaban Sistematis	33

BAB II KEDUDUKAN HUKUM BANK SELAKU KREDITOR PREFEREN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG DIRAMPAS NEGARA TERKAIT KASUS KORUPSI.....	35
1. Karakteristik Bank Selaku Kreditor Preferen Sebagai Pemegang Hak Tanggungan	35
2. Kedudukan Hukum Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi	47
3. Penyitaan Pidana Terhadap Objek Hak Tanggungan Bank Selaku Kreditor Preferen.....	56
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BANK SELAKU KREDITOR PREFEREN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG DIRAMPAS NEGARA TERKAIT KASUS KORUPSI.....	60
1. Prinsip-Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Memberikan Utang atau Kredit Kepada Nasabah Debitor	60
2. Upaya Hukum Bank Selaku Kreditor Preferen Pemegang Hak Tanggungan Yang Dirampas Negara Terkait Kasus Korupsi.....	71
3. <i>Ratio Decedendi</i> Putusan Hakim Terkait Bank Selaku Kreditor Preferen Pemegang Hak Tanggungan Yang Dirampas Negara Terkait Kasus Korupsi ...	80
BAB IV PENUTUP.....	85
1. Kesimpulan	85
2. Saran	86
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perwujudan Fungsi Intermediasi Bank di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Perbankan	4
Gambar 2 Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Bank Selaku Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Yang Dirampas Negara Terkait Kasus Korupsi	79

ABSTRAK

Terdapat dualisme terkait dengan kedudukan bank selaku pemegang hak tanggungan dengan perampasan pidana, yaitu ada yang menganggap kepentingan bank selaku kreditor preferen yang beritikad baik seyogyanya dilindungi, sehingga jika barang yang disita tersebut sudah dieksekusi, maka kreditur pemegang tanggunganlah yang memiliki hak lebih dulu menerima pelunasan. Namun, ada yang berpandangan bahwa kepentingan negara untuk menyita barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan harus didahulukan ketimbang kepentingan privat atau perdata. Atas dualisme tersebut, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini: 1. Bagaimana kedudukan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi? 2. Bagaimana perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua): Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu dengan perlawanan (*derden verzet*), sita persamaan, dan praperadilan. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu dengan keberatan, sebagaimana Pasal 19 UU Tipikor jo. Perma 2/2022.

Kata Kunci: Bank, Perampasan Barang Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum,

ABSTRACT

*There is a dualism related to the position of the bank as the holder of mortgage rights in criminal confiscation, namely that there are those who consider that the interests of the bank as a preferent creditor with good intentions should be protected, so that if the confiscated goods have been executed, then the credit holder of the mortgage has the first right to receive repayment. However, there are those who are of the view that the state's interest in confiscating goods suspected of originating from the proceeds of crime must take precedence over private or civil interests. Based on this dualism, the problem formulation in this research is: 1. What is the legal position of banks as preferent creditors holding mortgage rights confiscated by the state in connection with corruption cases? 2. What is the legal protection for banks as preferent creditors holding mortgage rights confiscated by the state in connection with corruption cases? This research is normative legal research with legislative, conceptual and case approaches. The results of this research are that the legal protection of banks as preferent creditors holding mortgage rights confiscated by the state in connection with corruption cases can be qualified into 2 (two): First, preventive legal protection, namely by resistance (*derden verzet*), confiscation of equality, and pretrial. Second, repressive legal protection, namely with objections, as in Article 19 of the Corruption Law jo. Perma 2/2022.*

Keywords: *Bank, Confiscation of Corruption Crimes, Legal Protection,*